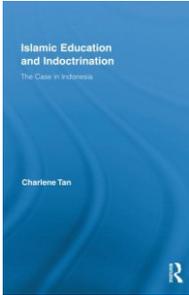


Indoktrinasi di Sekolah Islam: Studi Kasus di Indonesia

Desmaliza

Dosen Fakultas Tarbiyah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
r2liza@yahoo.ca



Judul buku : *Islamic Education and Indoctrination: The Case in Indonesia*
Penulis : Charlene Tan
Jumlah Halaman : 208
Tahun : 2011
Penerbit : Routledge research in education
ISBN : 978-415-87976-7

Buku ini merupakan hasil penelitian Charlene Tan selama beberapa waktu di Indonesia dengan mengambil sampel penelitian sekolah-sekolah Islam yang melaksanakan sistem pendidikan formal, non-formal dan informal. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pengalaman pribadi peneliti dan peristiwa-peristiwa yang ia temukan di sekelilingnya. Peneliti melihat bahwa sekolah-sekolah Islam khususnya madrasah telah dianggap sebagai tempat indoktrinasi bagi siswa-siswa Islam dan orang-orang militan. Tidak hanya di Indonesia, para pendidik dan orang tua di Amerika Serikat juga beranggapan bahwa mata pelajaran “pengenalan terhadap ajaran Islam” yang dipelajari di beberapa sekolah umum adalah sebuah usaha indoktrinasi. Berbagai publikasi artikel dan buku-buku juga menjamur berkaitan dengan isu indoktrinasi dalam Islam dan sekolah Islam di Amerika, misalnya sebuah penelitian yang menyimpulkan bahwa sekolah-sekolah Islam telah melakukan indoktrinasi terhadap anak-anak muda Islam untuk memuja jihad agar kemudian dapat direkrut menjadi pelaku bom bunuh diri. Selain itu, banyak juga istilah yang muncul untuk menggambarkan madrasah, diantaranya sebagai mesin penetas kekerasan ekstrim (*incubators for violent extremism*) dan pabrik jihad (*jihad factories*), pendoktrin siswa Muslim untuk membenci Barat (*indoctrinating them (Muslim students) with a hatred for the West*), ideologi intoleransi, kekerasan dan kebencian (*an ideology of intolerance, violence and hate*).

Penulis mengemukakan dua pertanyaan inti dari penelitiannya, yaitu: pertama, apa sesungguhnya indoktrinasi itu? dan kedua, apakah pendidikan Islam termasuk indoktrinasi? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian ini, peneliti memilih Indonesia sebagai lokasi penelitiannya karena beberapa alasan. Pertama, Indonesia merupakan salah satu negara Muslim

terbesar di dunia dengan jumlah penduduk 203 juta muslim pada tahun 2009, dan jumlah ini merupakan 80 persen dari seluruh penduduk muslim di Asia Tenggara. Kedua, Indonesia menjadi negara asal jema'ah islamiyah; sebuah kelompok militan muslim antar negara yang dituduh melakukan indoktrinasi terhadap jemaahnya melalui berbagai aktivitas dan afiliasinya dengan sekolah-sekolah Islam. Namun, di saat bersamaan, Indonesia terkenal dengan toleransi dan Islam inklusif yang dipromosikan oleh sejumlah sarjana Islam progresif yang menentang adanya upaya indoktrinasi kalangan Muslim militan.

Selanjutnya, metode penelitian yang digunakan merupakan kombinasi dari pertanyaan filosofis (*philosophical inquiry*) dan penelitian empiris (*empirical research*). Data penelitian lebih spesifik diperoleh dari kajian literatur, analisis dokumen dan penelitian ke lapangan yang dilaksanakan pada bulan Mei 2010 dengan sampel penelitian sebanyak 12 sekolah Islam di Indonesia. Sekolah-sekolah tersebut dipilih berdasarkan tipe yang berbeda: Pesantren, Madrasah dan Sekolah Islam dengan orientasi keberagaman yang berbeda pula, terdiri dari Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Persis dan yang lainnya. Data yang diperoleh peneliti berupa dokumen resmi sekolah, foto-foto sekolah, serta wawancara dengan direktur, staff dan personil inti sekolah lainnya. Data tambahan diperoleh dari website sekolah, interaksi dengan alumni dan orang tua siswa, diskusi dengan para dosen, mahasiswa dan lulusan Universitas Islam. Namun peneliti lebih menyoroti Pondok Pesantren Islam Al-Mukmin dan kelompok Jema'ah Islamiyah untuk melihat indoktrinasi yang mungkin terjadi di sekolah formal, non-formal dan informal.

Pada awal pembahasan, peneliti mengemukakan makna indoktrinasi dalam konteks keislaman. Berdasarkan makna literal indoktrinasi bermakna “menyampaikan apa yang diajarkan” (h. 2). Ia menyimpulkan bahwa kata “indoktrinasi” sama sekali tidak mengandung makna berkonotasi negatif. Kata “doktrin” sendiri juga tidak berhubungan dengan agama sampai abad pertengahan digunakan dalam pengajaran Gereja Katolik Roma. Maknanya sendiri menjadi berkonotasi negatif disebabkan, salah satunya, karena pengaruh praktisi pendidikan progresif yang berasumsi bahwa semua bentuk pendidikan authoritarian termasuk ke dalam pendidikan Agama.

Esensi dari indoktrinasi adalah mengontrol pikiran orang. Peneliti mengkaitkan indoktrinasi dengan istilah *control beliefs*, atau keyakinan yang dikontrol, yaitu keyakinan mendasar yang diperoleh melalui proses alamiah kebudayaan, pendidikan, sosialisasi dan interaksi dengan manusia dan alam. *Control beliefs* seperti yang terbersit dari namanya, mengontrol apapun yang masuk ke dalam sistem keyakinan dan menentukan bagaimana kita memandang segala sesuatu—diri sendiri, orang lain dan dunia ini. Sebuah kontrol

keyakinan memegang dua fungsi utama. Yang pertama, ia menampilkan sebuah fungsi adjudikatif (*adjudicative function*), yaitu yang menentukan bisa atau tidak bisa diterimanya keyakinan orang lain. Fungsi yang kedua adalah sebagai sebuah *conditioning function* yang berarti ia menyediakan kondisi bagi seseorang untuk menerima keyakinan lain ketika seseorang itu bermaksud memahami, menimbang dan atau membangun sebuah teori. Keyakinan, ketika dipegang sebagai *control beliefs*, adalah keyakinan primitif yang menentukan diterimanya dan berfungsinya keyakinan lain seperti *data* dan *data-background beliefs*. *Control beliefs* dapat menampilkan fungsi-fungsi ini karena ia kuat secara psikologis (*psychologically strong*) atau menjadi keyakinan sentral (*central beliefs*). Kekuatan psikologis keyakinan seseorang ditentukan oleh dua kondisi yaitu kualitas dan kuantitas dari *control beliefs*. Kualitas mengacu pada sejauh mana *control beliefs* itu melekat dalam ranah kognitif seseorang dan ia berada di ambang kesadaran menjadi keyakinan yang “habitual” dan otomatis. Sedangkan kuantitas mengacu pada banyaknya *control beliefs* di mana jika mereka tidak saling berkaitan dan tidak bersesuaian satu sama lain akan cenderung melemahkan kekuatan psikologis *control beliefs*. Karena itu, semakin sedikit *control beliefs*, semakin erat kelekatan mereka dalam ranah kognitif seseorang.

Bagaimana kaitan *control beliefs* ini dengan konsep indoktrinasi? Menurut penulis, orang yang terindoktrinasi adalah orang yang berpegang kuat pada *control beliefs*nya sehingga menghasilkan totalisme ideologis (*ideological totalism*). Mengutip pendapat psikolog Robert Jay Lifton, *ideological totalism* adalah ideologi yang tidak moderat dengan karakter individu yang tidak moderat yang muncul bersamaan (h. 20). Sebuah *totalistic ideology* atau ideologi totalistik mengacu pada “immoderate” atau ideologi ekstrim yang berpengaruh langsung terhadap kognitif, afektif, dan perkembangan tingkah laku seseorang. Secara kognitif, ideologi totalistik dapat membatasi horizon intelektual seseorang dengan membawa orang tersebut ke pandangan yang simplisistis dan biner, “kami versus anda”. Ideologi ini cenderung menghasut secara emosional “semua atau tidak sama sekali” melalui hubungan yang intens dan setia terhadap pemimpin dan anggota kelompoknya, serta menunjukkan permusuhan dan kebencian terhadap yang bukan kelompoknya. Tingkah laku yang muncul adalah mobilisasi pemikiran ekstrim dan emosi destruktif untuk melindungi ideologi seseorang dengan memberantas semua penghalang dan musuh mereka sekaligus. Ideologi ini mencakup tidak hanya dalam bidang agama atau politik saja, namun juga pada organisasi ilmiah.

Dalam konsep indoktrinasi, seseorang yang terindoktrinasi memiliki perbedaan dari orang yang tidak terindoktrinasi dalam hal *control beliefs*nya. Yang pertama, ia memiliki sangat sedikit *control beliefs*. Lingkungan

sekitarnya dibentuk untuk membuat si korban terisolasi dari keluarga dan masyarakatnya, dan terbuka hanya terhadap keyakinan yang ditentukan oleh pendoktrin. *Control beliefs* yang terseleksi ini biasanya diekspresikan dengan istilah “Tuhan”, “kebenaran”, “kebebasan”, dan “progres” (h. 20). Mereka juga berpandangan “dengan kami atau lawan kami”. Mereka juga percaya terhadap otoritas absolut. Perbedaan kedua adalah sejauh mana *control beliefs* melekat dalam susunan kognitif seseorang. *Control beliefs* pada orang yang terindoktrinasi akan sangat melekat kuat secara psikologis dan tertanam dalam susunan kognitifnya. Mereka menyaring dan mensensor input baru yang menentang atau berseberangan dengan *control beliefs* yang sudah ada dengan membentuk *control beliefs* baru untuk menolaknya, misalnya “ini berasal dari Setan” atau “hanya pendosa yang berfikir demikian”. Perbedaan ketiga, *control beliefs* orang-orang yang tidak terindoktrinasi itu sifatnya menetap, dalam tingkatan yang bervariasi, terbuka terhadap keraguan dan merevisi ketika ia berkeberatan terhadap ide-ide dan bukti yang kontradiktif. Sebaliknya, seseorang yang terindoktrinasi akan bersikeras dan bertahan terhadap tantangan eksternal. Peneliti memberi contoh orang yang terindoktrinasi diantaranya adalah Imam Samudra. Menurutnya, pandangan Imam Samudra sangat mirip dengan ideologi totalistik/*totalistic ideology*. *Control beliefs*nya tentang hubungan antara muslim dan non-muslim sangat membatasi pandangan intelektualnya dengan menariknya ke dalam perspektif binari: “jika anda tidak bersama kami berarti melawan kami” (h. 25). Imam Samudra juga menganjurkan sikap intoleransi, permusuhan dan kebencian terhadap semua non-Muslim.

Bab kedua berisi landasan teori mengenai indoktrinasi dan pendidikan Islam. Bab ini menjelaskan tradisi indoktrinasi, yang diciptakan, dipertahankan, dan diperkuat oleh kondisi tertentu serta berpengaruh terhadap perkembangan rasionalitas dan otonomi seseorang. Akan tetapi, indoktrinasi ini tidak akan eksis dan berkembang bila terisolasi. Ia membutuhkan lingkungan yang kondusif bagi pengikut sebuah komunitas untuk tunduk kepada seseorang atau beberapa orang pemimpin. Kondisi yang dibutuhkan, menurut Robert Jay Lifton, dapat dibagi ke dalam tiga aspek (h. 29): karakteristik kunci ideologi (mendirikan Negara Islam dan berperang demi Islam), justifikasi ideologi (penjelasan ideologi melalui sains dan pengalaman pribadi), dan strategi indoktrinasi (*cultural framing*). Penekanan *cultural framing* berada pada “teks” dan “konteks” pada pendidikan formal, non-formal dan informal. Teks mengacu pada tulisan-tulisan suci, khususnya tentang jihad dan hubungan yang ideal antara muslim dan non-muslim. Sementara konteks mengacu pada latar belakang sosial dan politik yang berisikan faktor internal dan eksternal yang bertentangan dengan dimana *cultural framing* berada. Selain itu, konteks juga

mengacu pada pendidikan formal (sekolah Islam), pendidikan non-formal (organisasi militan Muslim), dan pendidikan informal (jaringan pemikiran Muslim). Melalui berbagai bentuk pendidikan ini, stimulus eksternal diberikan terus menerus melalui faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal yaitu perkembangan internasional seperti berbagai peristiwa politik yang mempengaruhi masyarakat Muslim dunia, sementara faktor internal berkaitan dengan ekonomi, sosial, agama, politik dan kondisi hidup seseorang. Semua faktor ini dimanipulasi oleh orang yang mengindoktrinasi untuk mengendalikan emosi korban untuk memegang *control beliefs* suatu kelompok dan memenuhi misi kelompok tersebut.

Pada bab ketiga dan keempat, penulis lebih menyoroti tradisi indoktrinasi di Pondok Pesantren Islam Al Mukmin, dan bagaimana sebuah tradisi indoktrinasi ini dapat eksis dan tumbuh subur dalam sistem pendidikan non-formal dan informal sebagaimana yang dicontohkan oleh organisasi Muslim militan, Jemaah Islamiyah. Menurut peneliti, Abu Bakar Ba'asyir adalah bapak pendiri dan figur yang kharismatik sehingga berperan secara signifikan dalam penciptaan tradisi indoktrinasi di pesantren Ngruki (h. 44). Peneliti juga mengamati upaya sekolah tersebut dalam menanamkan *control beliefs* pada siswa untuk menghasilkan *ideological totalism* melalui tiga aspek: kurikulum agama, aktivitas sekolah dan kurikulum sekolah yang tidak tampak (*hidden curriculum*).

Selanjutnya, bab lima membahas masukan peneliti bahwa indoktrinasi dapat dilawan dan dihindari terutama melalui penciptaan dan memajukan tradisi kependidikan. Menurut peneliti, tradisi kependidikan merupakan salah satu hal yang *anti-totalistic*, yang menjadi dasar bagi *control beliefs* dari pluralisme agama, kekuatan rasionalitas dan kekuatan otonomi.

Bahasan mengenai survey dan analisa sekolah-sekolah Islam di Indonesia dijelaskan peneliti pada bab enam dan tujuh. Ia sampai pada kesimpulan bahwa kebanyakan sekolah Islam di Indonesia tidak didasarkan pada tradisi indoktrinasi. Sebaliknya, sekolah-sekolah ini terbuka untuk menerima pengetahuan melalui pelajaran-pelajaran non-agamis, mengedepankan rasionalitas dan kemandirian melalui pengajaran yang terpusat pada siswa dan aktifitas siswa. Namun demikian, penulis tetap mengkritik sekolah-sekolah Islam ini. Ia beranggapan bahwa kebanyakan sekolah-sekolah tersebut tidak cukup menekankan unsur kekuatan rasionalitas, kekuatan kemandirian, dan pluralisme agama dalam perkembangan siswa. Kenyataannya, sekolah-sekolah ini lebih menekankan pendidikan agama secara normatif dengan mengikuti kurikulum nasional.

Sebagai penutup, peneliti menjelaskan bagaimana tradisi kependidikan tetap eksis dan tumbuh dengan subur di suatu masyarakat. Penulis menjelaskan

bagaimana *control beliefs* terhadap pluralism keberagamaan, kekuatan rasionalitas (*strong rationality*), dan kekuatan kemandirian (*strong autonomy*) dapat dikembangkan melalui sistem pendidikan formal, non-formal dan informal. Untuk menanamkan pluralisme keberagamaan, Ia menganjurkan adanya pendidikan dialogis (*dialogical education*) yang terdiri dari tiga macam, antara lain dialog persiapan (*preliminary dialogue*) misalnya dengan mengunjungi tempat ibadah lain, dialog praktis (*practical dialogue*) dengan bekerja sama antar pemeluk umat beragama, dan dialog kritis (*critical dialogue*) yaitu dialog yang terencana antar umat beragama. Semua dialog ini tidak hanya terbatas pada sekolah formal saja namun juga pada pendidikan informal dan non-formal. Muslim yang memiliki *strong rationality* adalah Muslim yang berkeinginan dan mampu mempertanyakan secara internal dan eksternal tradisi mereka dan orang lain (h. 134). Mereka juga terbuka dan terikat dengan tradisi Islam dan non-Islam. Muslim yang memiliki *strong autonomy* adalah Muslim yang bisa didorong untuk mengaplikasikan ajaran Islam secara reflektif dan kritis dengan memutuskan sendiri dan mengadaptasikannya dengan tempat dan waktu (h. 134). Sebagaimana dikutip oleh Tariq Ramadhan, tujuan pendidikan adalah untuk menjadikan Muslim mampu berintegrasi dengan pertumbuhan personal mereka menjadi mandiri, menentukan pilihan sendiri dan lebih umum, mengatur sendiri kebebasan mereka.

Buku ini patut dibaca oleh para praktisi pendidikan, peneliti, guru, orang tua, dan bahkan semua pihak yang ingin tahu praduga ada atau tidaknya tradisi indoktrinasi di sekolah-sekolah Islam khususnya yang ada di Indonesia. Buku ini dapat pula menjadi jawaban bagi keraguan umat Islam sendiri untuk tetap menyekolahkan anaknya ke sekolah Islam tanpa mencemaskan adanya upaya indoktrinasi di sekolah tersebut.